ANALISIS SINERGI KEMENPORA, BPS, DAN KPU DALAM AKSELERASI INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA (IPP) HINGGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Muhammad Sholikhin[1], Marta Sulistyaningsih[2]

[1]DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bekasi, Gerakan Pemuda Ansor, Indonesia.

[2]Fatayat Nahdlatul Ulama, *(Yayasan Sahabat Inspirator Indonesia)*, SII Kota Bekasi, Indonesia
Email: [1]emha.sholihin@gmail.com, [2]martasulistyaningsih@gmail.com

Keywords
Keywords: Youth Development Index, Kemenpora, BPS, KPU, democratic participation

Kata Kunci
Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora, BPS, KPU, partisipasi demokrasi

ABSTRCT

This study analyzes the calculation and validation process of the Youth Development Index (Indeks Pembangunan Pemuda, IPP) in Indonesia for the period 2020–2025, conducted collaboratively by the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) and the Central Statistics Agency (BPS), alongside its relationship with the Election Participation Index (IPP) developed by the General Elections Commission (KPU) of Indonesia. The primary objective is to understand cross-agency synergy in providing accurate and participatory youth data. A descriptive analytical method was employed by reviewing official documents, statistical publications, and consultative meetings between Kemenpora, BPS, and KPU. Findings indicate that the multimethod estimation approach (direct estimation, data pooling, and cluster imputation) improves the reliability of the IPP at the district/city level. Meanwhile, the Election Participation Index complements the IPP by measuring the dimensions of participative democracy among youth. This collaboration strengthens the youth development data foundation and promotes evidence-based public policy.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses penghitungan dan validasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia tahun 2020–2025 yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), serta hubungannya dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami sinergi lintas lembaga dalam penyediaan data kepemudaan yang akurat dan partisipatif. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menelaah dokumen resmi, publikasi statistik, dan hasil pertemuan konsultatif Kemenpora–BPS–KPU. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan multimetode estimasi (direct estimation, data pooling, dan cluster imputation) meningkatkan reliabilitas IPP di level kabupaten/kota. Indeks Partisipasi Pemilu (KPU) melengkapi IPP dengan mengukur dimensi demokrasi partisipatif pemuda. Kolaborasi ini memperkuat basis data pembangunan kepemudaan dan mendorong kebijakan publik berbasis bukti.

1. PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan kualitas pembangunan pemuda di Indonesia merupakan prioritas strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Sejak 2020, Kemenpora bekerjasama dengan BPS melaksanakan pertemuan konsultatif dan validasi data untuk memfinalisasi IPP hingga tingkat kabupaten/kota (BPS, 2024; Kemenpora, 2024). Inisiatif ini bertujuan menyediakan data akurat, valid, dan dapat dibandingkan antarwilayah sehingga IPP dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan pembangunan kepemudaan berbasis bukti (Kemenpora & BPS, 2025). Sinergi lintas lembaga, termasuk KPU, memperkuat integrasi pembangunan pemuda dengan partisipasi demokrasi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

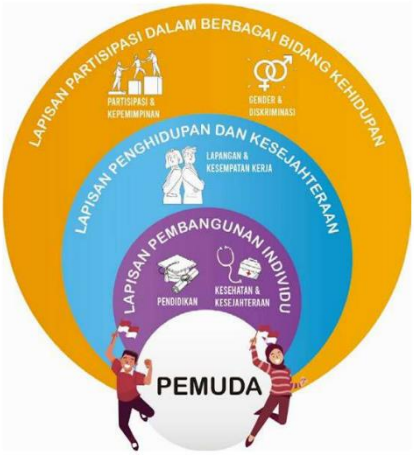

Gambar 1. 2 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2024

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap publikasi resmi Kemenpora, BPS, dan KPU pada periode 2020–2025. Sumber utama meliputi laporan statistik nasional, Statistik Pemuda Indonesia 2024, Laporan IPP 2023, dan rilis resmi KPU (Kemenpora & BPS, 2024; KPU, 2025). Analisis dilakukan dengan kategorisasi tematik, triangulasi sumber, dan interpretasi model estimasi IPP serta indikator partisipasi politik.

3. HASIL PENELITIAN

3.1.

Tahapan Penghitungan Estimasi IPP (2020–2023)

Menurut BPS (2024), penghitungan IPP terdiri atas:

- Direct estimation: estimasi langsung dari data Susenas dan Sakernas;
- Estimation projection: menggunakan data Susenas MSBP pada tahun tanpa survei modul;
- Data pooling imputation: penggabungan data lintas tahun dan wilayah untuk meningkatkan presisi;
- Cluster imputation: pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi serupa untuk mengatasi keterbatasan data.

Pendekatan multimetode ini menjamin konsistensi antarprovinsi dan meningkatkan reliabilitas estimasi di tingkat kabupaten/kota (Kemenpora & BPS, 2025).

3.2.

Ground Checking dan Validasi Lapangan

Sebagai bagian dari upaya menjaga keakuratan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melaksanakan ground checking dan validasi lapangan di wilayah-wilayah yang menunjukkan nilai IPP ekstrem, baik tinggi maupun rendah. Proses validasi ini mencakup verifikasi sumber data primer, kunjungan langsung ke lapangan, serta wawancara mendalam dengan tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) di tingkat kabupaten/kota (BPS, 2024).

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penghitungan IPP tidak hanya valid secara statistik tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan dinamika di masyarakat lokal. Selain itu, validasi lapangan memperkuat kredibilitas data yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kepemudaan yang tepat sasaran.

Rekomendasi pelaksanaan ground checking hingga tingkat kabupaten/kota meliputi penguatan kapasitas tim validasi melalui pelatihan metodologi survei dan wawancara, peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, serta pengembangan sistem pemantauan digital yang memungkinkan integrasi data hasil validasi secara real-time. Dengan demikian, mekanisme validasi ini dapat mendukung keberlanjutan pengumpulan data yang akurat dan pemanfaatan data IPP untuk perencanaan pembangunan kepemudaan berbasis bukti di seluruh wilayah Indonesia (Kemenpora, 2025).

3.1.1.

Domain dan Sumber Data IPP
IPP merupakan **indeks komposit,** yaitu ukuran gabungan dari lima domain utama **(BPS, 2024):**

Domain	Sumber Data	Fokus Pengukuran
Pendidikan & Pelatihan	Susenas KOR, Sakernas	Kapasitas dan keterampilan pemuda
Kesehatan & Kesejahteraan	Susenas KOR, MSBP	Kualitas kesehatan dan kesejahteraan hidup
Ketenagakerjaan Layak	Sakernas	Akses pekerjaan dan kewirausahaan muda
Partisipasi & Kepemimpinan	Susenas MSBP, Sakernas	Keterlibatan sosial-politik pemuda
Inklusivitas & Kesetaraan	Sakernas, Susenas KOR	Kesetaraan akses gender

3.1.2

Implementasi di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat, dengan sekitar 12 juta pemuda, mencatat nilai IPP 51,17 tahun 2023 (naik dari 49,67 pada 2022), masih di bawah nilai nasional 56,33 (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024; Kemenpora & BPS, 2024). Peningkatan terbesar pada domain pendidikan dan kesehatan, sementara partisipasi sosial dan kepemimpinan tertinggal. BPS Jawa Barat menerapkan direct estimation di wilayah perkotaan (Bandung, Bekasi) dan data pooling untuk kabupaten dengan sampel terbatas. Ground checking dilakukan di Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Hasil digunakan dalam peta spasial IPP 2025 sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah (Kemenpora, 2025).

3.1.3

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 oleh KPU RI

KPU meluncurkan IPP Pemilu dan Pilkada 2024 yang mengukur lima dimensi: registrasi pemilih, pencalonan, kampanye dan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, dan partisipasi pemilih (KPU, 2025). Kategori partisipasi menunjukkan variasi engagement di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. IPP Pemilu lebih menilai kualitas kesadaran politik dan kepercayaan warga, bukan sekadar jumlah kehadiran.

4. PEMBAHASAN

Pembahasan terkait konsep pembangunan pemuda Indonesia yang dikonseptualisasikan dalam tiga lapis utama penguatan individu, penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi sosial dan kepemimpinan menunjukkan pendekatan terpadu dan sinergis lintas sektor dalam pengembangan kapasitas dan kualitas hidup pemuda. Lapis pertama, penguatan individu, meliputi peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, sebagai fondasi utama agar pemuda mampu bersaing dan berkembang secara optimal (Kemenpora & BPS, 2025). Selanjutnya, lapis kedua, penghidupan dan kesejahteraan, menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi dan akses terhadap pekerjaan layak sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang mendorong pemuda untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Lapis ketiga menyoroti peran partisipasi sosial dan kepemimpinan, dengan fokus pada keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai aspek kehidupan publik guna memperkuat dinamika sosial dan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

Sinergi antara Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dikembangkan oleh Kemenpora dan BPS dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dari KPU mempertegas pentingnya integrasi data yang komprehensif dan akurat untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti. Integrasi ini menyediakan informasi menyeluruh mulai dari aspek individual, sosial-ekonomi, hingga partisipasi politik pemuda, sehingga pemuda bukan hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai aktor kunci dalam mencapai target strategis Indonesia Emas 2045. Model pembangunan ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan berkelanjutan yang menjembatani peran pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, guna memastikan generasi muda siap menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa.

5. KESIMPULAN

Sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghasilkan data kepemudaan yang akurat, komprehensif, dan partisipatif hingga tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi lintas lembaga ini berhasil memadukan dua indeks nasional yang saling melengkapi: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mengukur pemberdayaan sosial-ekonomi serta kesejahteraan pemuda, dan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) yang menilai kualitas keterlibatan politik dan demokrasi partisipatif. Dengan adanya integrasi data yang kuat, kebijakan pembangunan pemuda dapat dirumuskan secara berbasis bukti yang relevan secara lokal dan nasional.

Pentingnya keberlanjutan sinergi antar lembaga diimbangi dengan evaluasi berkala demi percepatan pencapaian target pembangunan kepemudaan. Pendekatan terintegrasi ini juga mendukung posisi pemuda sebagai pilar utama pembangunan nasional dan motor utama dalam mewujudkan visi strategis Indonesia Emas 2045. Dukungan kolaboratif dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta stakeholder terkait menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan berbasis data IPP. Pengembangan sistem data yang lebih akurat dan holistik akan memperkuat fondasi perencanaan strategis dan program kepemudaan secara efektif di masa depan (Kemenpora & BPS, 2025; Kemenpora, 2025; KPU, 2025; BPS, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

1. **Article from online magazine / news**

   ANTARA News. (2025, October 18). *KPU: IPP Pilkada 2024 jadi acuan revisi sistem pemilu.* ANTARA. Diunduh dari: https://www.antaranews.com

2. **Report / Institutional publication (Government publication – setara dengan "book citation")**

   Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024.* Jakarta: BPS RI.

3. **Report / Institutional publication (Regional statistics report)**

   Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Laporan IPM dan IPP Provinsi Jawa Barat 2023–2024.* Bandung: BPS Jabar.

4. **Government publication (Research report)**

   Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2024). *Laporan IPP 2023: Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2020–2023.* Jakarta: Kemenpora RI.

5. **Government publication (Joint institutional report)**

   Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia & Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia Tahun 2023: Analisis dan Perbandingan Antardaerah.* Jakarta: Kemenpora RI dan BPS RI.

6. **Online government publication (without DOI)**

   Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia & Badan Pusat Statistik. (2025). *Finalisasi IPP 2025 hingga level kabupaten/kota.* Diunduh dari: https://deputi1.kemenpora.go.id/detail/599/kemenpora-dan-bps-perkuat-sinergi-finalisasi-ipp-2025-hingga-level-kabupaten-kota

7. **Institutional publication (National Commission report)**

   Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Rilis Indeks Partisipasi Pemilu dan Pilkada 2024.* Jakarta: KPU RI.

8. **Article from online magazine / blog (without DOI)**

   Kompasiana. (2025, August 24). *Mengoptimalkan data IPP untuk pembangunan pemuda: Langkah progresif menuju masa depan yang lebih baik.* Diunduh dari: https://www.kompasiana.com/ndenmasbei2071/66e1106134777c088c0a0072